

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI – BSN
TAHUN 2015**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JANUARI 2016**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Renstra PKS tahun 2015-2019, maka untuk mewujudkan sasaran tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk menunjang pengembangan SNI maka, PKS menetapkan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan
2. Tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi
3. Penguatan posisi Indonesia di bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
4. Fasilitasi pemberian tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional

Secara umum, kinerja PKS pada tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan tahun 2015 dari Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PKS yang ditetapkan dalam Renstra PKS tahun 2015-2019. Prosentase tingkat capaian yang diraih pada tahun 2015 adalah:

Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015 (kegiatan utama pendukung pengembangan SNI)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	1	Jumlah MoU yang ditandatangani	10 dokumen	21 dokumen	100 %
	2	Jumlah implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang telah dilaksanakan	16 workshop/ seminar	14 workshop/ seminar	88%
	3	Jumlah Posisi Indonesia di bidang SPK yang telah dirumuskan	15 kertas posisi	21 kertas posisi	140%
	4	Jumlah ballot yang telah ditanggapi	800 ballots	1153 ballots	144 %

Realisasi penanganan perumusan posisi Indonesia di bidang SPK mengalami peningkatan dari yang ditargetkan sebanyak 15 kertas posisi menjadi 21 kertas posisi sejalan dengan partisipasi Indonesia dalam forum pertemuan PASC, GSO, AHKFTA, ACFTA, ACCSQ-WG1, dan ACCSQ Special Meeting. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan balloting dimana dari target 800 dokumen yang harus ditanggapi, pada kenyataannya terdapat 1153 dokumen yang masuk dan semuanya telah diberikan tanggapan.

Kegiatan pada Pusat Kerjasama Standardisasi yang berkontribusi kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN adalah:

1. Penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO

2. Penguatan standar dan penilaian kesesuaian melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO

Pusat Kerjasama Standardisasi juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penanganan layanan aplikasi IIN.

**Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015
(kegiatan pendukung pencapaian IKU BSN dan pelayanan kepada masyarakat)**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	1	Jumlah notifikasi dan inquiry yang diproses	20 dokumen notifikasi regulasi teknis dan 43 enquiry	20 dokumen notifikasi regulasi teknis dan 43 enquiry	100%
	2	Jumlah Kertas Posisi yang dirumuskan forum TBT WTO	12 kertas posisi	12 kertas posisi	100%
Memastikan pelayanan masyarakat terkait IIN	3	layanan aplikasi IIN	10 aplikasi	5 aplikasi	50%

Realisasi penanganan notifikasi dan enquiry, selama tahun 2015, dari target awal 60 enquiries, ternyata hanya ada 43 enquiries yang masuk dan semuanya ditanggapi sehingga capaiannya adalah 100%.

Perlu dicermati, bahwa perumusan target dibedakan menjadi dua target yaitu 1) target yang sesuai dengan kebijakan BSN dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan BSN untuk mencapai, dan 2) target yang ditetapkan berdasarkan prediksi/perkiraan dari capaian tahun sebelumnya dimana hal ini bisa berubah sejalan dengan perkembangan kerjasama yang ada. Hal ini terjadi pada kegiatan penanganan MoU, balloting, serta penanganan notifikasi dan enquiries.

Sementara itu terkait pagu anggaran PKS tahun 2015 dan realisasinya, maka PKS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. **10.564.249.000**, untuk membiayai 4 (empat) kegiatan utama yang ada dimana hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 96.85 %.

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Perencanaan Kinerja	4
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	7
A. Capaian Kinerja Organisasi	7
B. KERJASAMA STANDARDISASI DALAM NEGERI	7
C. KERJASAMA STANDARDISASI INTERNASIONAL.....	14
C.1. Forum Bilateral.....	14
C.2. Forum Regional,	15
C.2.1. Forum Regional ASEAN.	15
C.2.2. Forum APEC SCSC.	16
C.2.3. Forum ASEAN – FTA.	16
C.3. Forum Kerjasama Multilateral	16
C.4. Forum WTO – TBT.	20
D. Realisasi Anggaran.....	24
Bab IV. Penutup.....	25

Daftar Tabel

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi PKS 2015-2019	4
Tabel 2. Sasaran Tahunan, Indikator dan Target 2015-2019	5
Tabel 3. Sasaran Tahunan Pusat Kerjasama Standardisasi (2015-2019).....	6
Tabel 4. Pencapaian Target Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi Tahun 2015	7
Tabel 5. Rekapitulasi Kegiatan Penjajakan, Penandatanganan dan Evaluasi Kerjasama dalam Negeri (2015).....	7
Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemda (2013-2015).....	8
Tabel 7. Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Perguruan Tinggi Tahun 2015	9
Tabel 8. Rekapitulasi Aplikasi IIN (2013 – 2015)	13
Tabel 9. Rekapitulasi MoU Bilateral (2011-2015)	14
Tabel 10. Kinerja Tanggapan atas Draft Standar ISO (2012-2015).....	17
Tabel 11. Kinerja Tanggapan atas Draft Standar IEC (2012-2015)	17
Tabel 12. Status Keanggotaan Indonesia di ISO (2012 – 2015).....	18
Tabel 13. Status Keanggotaan Indonesia di IEC (2012 – 2015)	19
Tabel 14. Penanganan outgoing notifikasi dan Enquiry pada subbidang notifikasi Pusat Kerjasama Standardisasi BSN	21
Tabel 15. Notifikasi Rancangan Regulasi teknis dan Regulasi Teknis.....	21
Tabel 16. Perkembangan Posisi Indonesia untuk STC – WTO (2012-2015)	23
Tabel 17. Pagu anggaran dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2015 Kedeputian PKS - BSN	24
Tabel 18. Pagu anggaran PKS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2015	24
Tabel 19. Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015 (kegiatan utama pendukung pengembangan SNI)	25
Tabel 20. Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015 (kegiatan pendukung pencapaian IKU BSN dan pelayanan kepada masyarakat)	26

Bab I. Pendahuluan

BSN telah ditunjuk oleh Pemerintah (PP 102/2000) menjadi Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi. Partisipasi Indonesia di bidang standardisasi meliputi forum pengembang standar dan forum kerjasama ekonomi global. Peran aktif dalam forum organisasi pengembang standar di tingkat internasional seperti ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), dan CAC (*Codex Alimentarius Commission*) merupakan bentuk nyata tanggung jawab BSN dalam mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar selaras dengan standar internasional serta dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional maupun kepentingan sesama negara berkembang. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip perumusan standar internasional yaitu keterwakilan semua negara anggota sesuai dengan tingkat perkembangannya (*development dimension*) di samping prinsip lainnya seperti, *openess, consensus, transparent, effective/efficient* dan *coherent*.

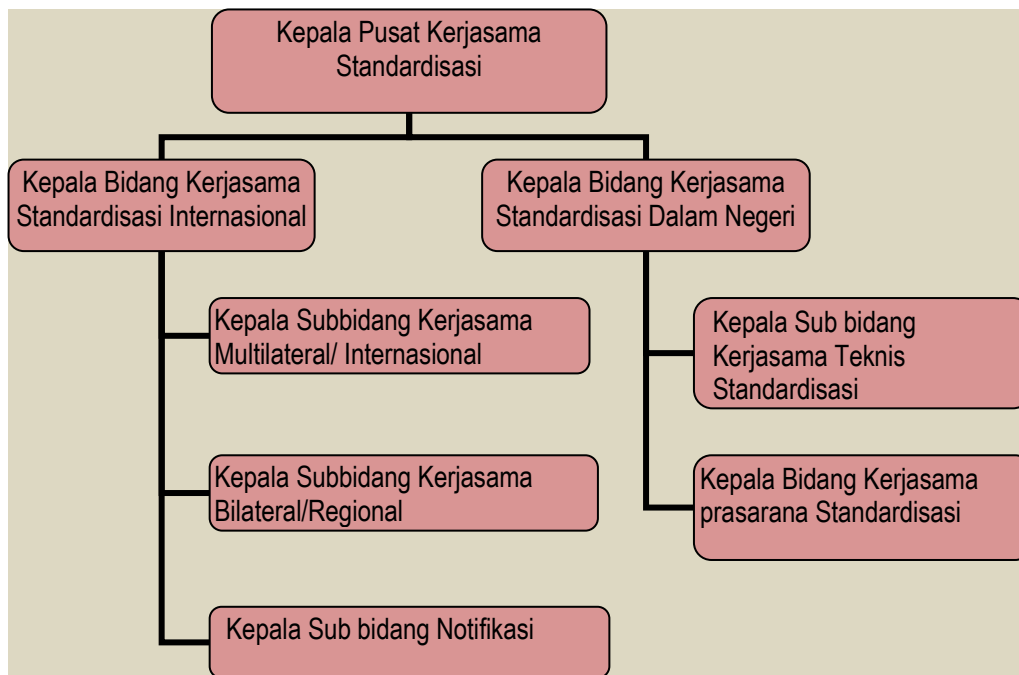
Kerjasama merupakan salah satu unsur pendukung yang berperan dalam pengembangan standardisasi. Kerjasama dilakukan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Dalam aspek kerjasama ekonomi global melalui liberalisasi perdagangan, BSN sebagai *focal point* nasional untuk standardisasi dan penilaian kesesuaian selama ini telah berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum ASEAN dan APEC. Dalam forum standardisasi dan akreditasi regional dan internasional, BSN berperan aktif dalam berbagai forum seperti PASC (*Pacific Area Standard Congress*), *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC) *International Accreditation Forum* (IAF), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) serta *World Trade Organization* (WTO) sebagai Organisasi Perdagangan Dunia.

Keanggotaan Indonesia dalam WTO yang diperkuat dengan ratifikasi Perjanjian WTO melalui UU No.7/1994 membawa konsekuensi bahwa Indonesia berkewajiban untuk mematuhi seluruh Perjanjian WTO dimana yang terkait dengan standardisasi adalah Perjanjian TBT (*Agreement on Technical Barrier to Trade*) atau yang disebut Hambatan Teknis Perdagangan (HTP). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengatur perdagangan produk dengan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan syarat tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan. Untuk menghindari hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh anggota WTO harus mematuhi prinsip transparansi (notifikasi), non diskriminasi, ekuivalensi, dan harmonisasi serta mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan serta organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO antara lain adalah ISO, IEC, CAC, dan ITU (*International Telecommunication Union*).

Di tingkat nasional, pengembangan SNI dilakukan oleh BSN melalui kerjasama dengan instansi teknis terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dunia industri, dan masyarakat konsumen dengan penekanan kepada penguatan aspek kesadaran akan pentingnya standar untuk peningkatan nilai tambah produk, serta efisiensi produksi dalam dunia industri dan perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup bagi masyarakat luas selaku konsumen.

Penggunaan produk bertanda SNI secara konsisten baik oleh dunia industri maupun masyarakat luas pada akhirnya akan mendukung perekonomian nasional dan memperkuat daya saing produk di era kompetisi perekonomian global yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup bangsa.



Gambar 1. Struktur Organisasi PKS-BSN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI pada tanggal 17 September 2014, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) BSN bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK). Lebih lanjut dijelaskan dalam Organisasi dan Tata Kelola BSN, PKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
- b. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;
- d. pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, PKS mempunyai 2 (dua) bidang: (1) Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional (KSI) dan Bidang (2) Kerjasama Dalam Negeri (KSDN). Bidang KSI melaksanakan penguatan posisi Indonesia dalam forum standar internasional ISO dan IEC; melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di tingkat bilateral, regional, multilateral dan internasional dan memperkuat penyusunan regulasi teknis di Indonesia serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari stakeholder dengan menyelenggarakan fungsi sebagai

notification body and inquiry point sebagai pelaksanaan perjanjian TBT-WTO. Bidang KSDN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kerjasama standardisasi lintas sektoral dan daerah serta perguruan tinggi. Selain itu, Bidang KSDN juga melakukan kerjasama prasarana perdagangan dalam rangka penyelesaian hambatan perdagangan.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pusat Kerjasama Standardisasi sampai dengan Desember 2015 berjumlah 21 (duapuluh satu orang, dengan komposisi menurut jenis kelamin hampir berimbang (12 laki-laki dan 9 perempuan).

Bab II. Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kerjasama berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Kedeputan Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2015, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi TA 2015, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2015. Tabel 1 memaparkan sasaran strategis Deputi PKS untuk periode 5 tahun beserta dengan indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi PKS 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	1. Jumlah Rancangan Akhir SNI (RASNI) yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	10762	Jumlah RASNI
2	Mewujudkan kerjasama internasional bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dalam rangka memfasilitasi kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	2. Persentase rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	80%	Persentase
		3. Jumlah kesepakatan kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	40	Dokumen kerjasama
3	Memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	4. Persentasi posisi kebijakan Indonesia yang terakomodasi dalam forum TBT WTO	100%	Persentase
4	Meningkatnya kajian/penelitian di bidang standardisasi	5. Persentase hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	80%	Persentase
		6. Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	5	Dokumen hasil penelitian

Tabel 2 memuat sasaran tahunan selama 5 tahun, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh Deputi PKS.

Tabel 2. Sasaran Tahunan, Indikator dan Target 2015-2019

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	8762	9262	9762	10262	10762	Dokumen RASNI
2	Memastikan tersedianya rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
3	Meningkatnya kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	Jumlah kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional	44	52	60	68	76	Dokumen kerjasama
4	Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI, penilaian kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
6	Memastikan tersedianya hasil penelitian mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	2	3	4	5	6	Dokumen hasil penelitian

Khusus untuk Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS), target capaian kerja untuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Tahunan Pusat Kerjasama Standardisasi (2015-2019)

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Memastikan tersedianya rekomendasi hasil kerjasama yang mendukung pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70%	75%	75%	80%	80%	Persentase
2	Meningkatnya kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia di forum perdagangan global	Jumlah kerjasama bidang standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional	44	52	60	68	76	Dokumen kerjasama
3	Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja PKS diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya.

Tabel 4. Pencapaian Target Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi Tahun 2015

Sasaran Strategis	PENCAPAIAN TARGET SETAHUN			Permasalahan/ Kendala	Perbaikan/ tindak lanjut	
	Target	Realisasi	%			
Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70%	70%	100	Kepentingan Indonesia dalam standardisasi internasional belum diakomodasi secara optimal	Rekomendasi perlu difokuskan pada standardisasi produk potensial

Untuk mencapai target tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI sebesar 70%, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional (kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta) dan internasional (kerjasama bilateral, regional dan multilateral).

B. KERJASAMA STANDARDISASI DALAM NEGERI

Dalam kerangka pengembangan dan pembinaan standardisasi dalam negeri, BSN pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan perintisan kerjasama sebanyak tiga daerah (Pemprov. Jateng, Jabar, dan Gorontalo), evaluasi kerjasama sebanyak dua daerah (Pemprov. Kaltim, dan NTB) dan telah menandatangani sebanyak 22 dokumen Kesepakatan Bersama ataupun Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Pemprov (Kaltim, Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta), Kementerian/Institusi Nasional (KUKM, Asdep Urusan Produktivitas dan Mutu KUKM, PT. POS, dan LIPI), Swasta/Yayasan (PT. PNM, dan Yayasan KEHATI) serta Universitas (Univ. Diponegoro, UGM, Univ. Panca Sakti, Univ Brawijaya, Univ. Udayana, IPB, Univ. Jend. Soedirman, Unhas, Univ. Mahasaraswati, Univ. Balikpapan, UNEJ, dan Univ. Charita Musi).

Tabel 5. Rekapitulasi Kegiatan Penjajakan, Penandatanganan dan Evaluasi Kerjasama dalam Negeri (2015)

No	Mitra Kerja	2015	
		Rencana	Realisasi
1	Pemprov. Jawa Tengah (penjajakan dan penandatanganan)	2	2
2	Pemprov. Gorontalo (penjajakan)	1	1
3	Pemprov. Jawa Barat (penjajakan dan penandatanganan)	2	2
4	Pemprov. Kaltim (Evaluasi)	1	1
5	Pemprov. NTB (Evaluasi)	1	1

No	Mitra Kerja	2015	
		Rencana	Realisasi
6	Kementerian Koperasi dan UKM	0	1
7	Asdep Urusan Produktivitas dan Mutu, KUKM	0	1
8	Universitas Diponegoro	0	1
9	UGM	0	1
10	Universitas Pancasakti, Tegal	0	1
11	PT Pos Indonesia (penjajakan dan penandatanganan)	0	2
12	Universitas Brawijaya, Malang	0	1
13	Universitas Udayana, Bali	0	1
14	IPB, Bogor	0	1
15	Unsoed, Purwokerto	0	1
16	Unhas, Makassar	0	1
17	Universitas Balikpapan	0	1
18	Universitas Mahasaraswati, Denpasar	0	1
19	LIPI	0	1
20	PT PNM (persero)	0	1
21	Yayasan KEHATI	0	1
22	Pemprov. DKI	0	1
23	Univ. Jember	0	1
24	Univ. Charita Musi	0	1
25	Tulang Bawang, Lampung	0	1
	TOTAL	7	28



Tabel 6. Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemda (2013-2015)

No	Daerah	2013		2014		2015	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Sumatera Selatan	-	-	4	4	7	6
2	Tasikmalaya	-	-	3	3	-	0
3	Sulawesi Utara	5	3	3	3	5	0

No	Daerah	2013		2014		2015	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
	(Manado & sekitarnya)						
4	Kepulauan Bangka-Belitung (Pangkal Pinang & sekitarnya)	2	2	6	5	3	3
5	Bali (Denpasar & sekitarnya)	8	6	8	6	9	3
6	Nusa Tenggara Barat (Mataram & sekitarnya)	7	4	4	3	9	4
7	Kalimantan Barat (Pontianak & sekitarnya)	12	6	4	3	5	2
8	Sumedang	2	2	2	2	1	1
9	Kalimantan Timur (Samarinda/Balikpapan & sekitarnya)	8	5	2	1	7	2
10	Sulawesi Selatan (Makassar & sekitarnya)	16	14	11	8	10	3
11	Jawa Timur (Surabaya & sekitarnya)	17	15	13	9	11	5
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	7	19
13	Jawa Barat (Bandung & sekitarnya)	-	-	-	-	12	7
14	Jawa Tengah (Semarang & sekitarnya)	-	-	-	-	19	5
	TOTAL	77	57	60	47	105	60

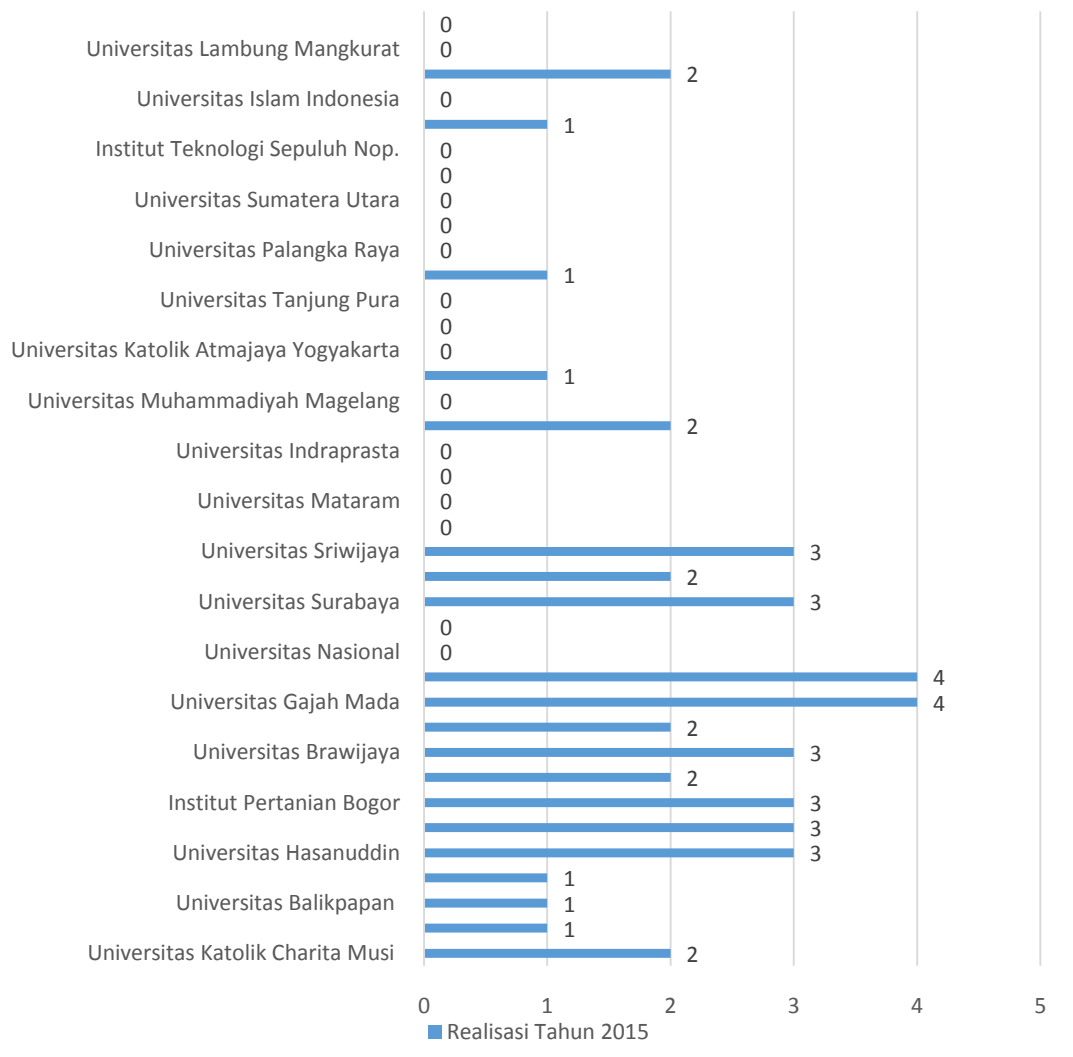
Selain Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemerintah Daerah, di tahun 2015 PKS melakukan Kegiatan Implementasi kepada Perguruan Tinggi yang telah melakukan MoU.

Tabel 7. Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Perguruan Tinggi Tahun 2015

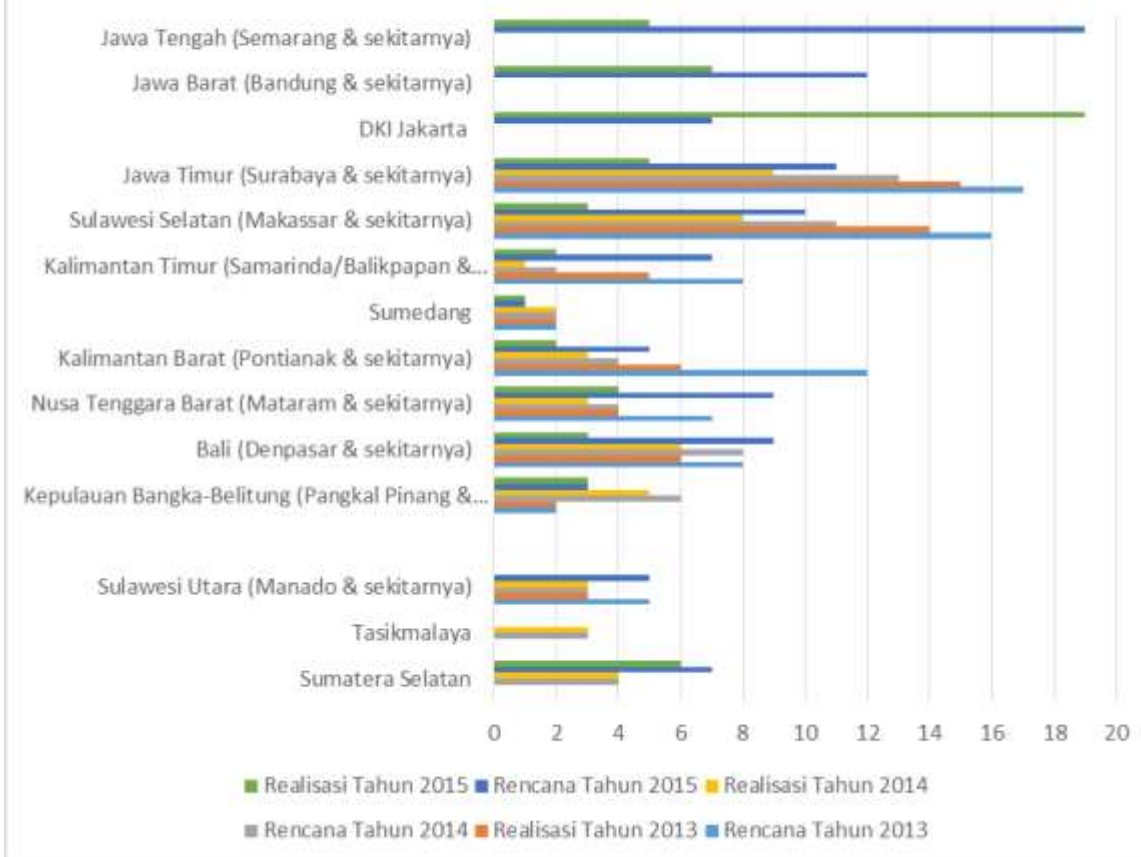
No	Daerah	2015	
		Rencana	Realisasi
1	Universitas Katolik Charita Musi	2	2
2	Universitas Jember	1	1
3	Universitas Balikpapan	1	1
4	Universitas Mahasaraswati, Denpasar	1	1
5	Universitas Hasanuddin	3	3
6	Universitas Jenderal Soedirman	3	3

No	Daerah	2015	
		Rencana	Realisasi
7	Institut Pertanian Bogor	3	3
8	Universitas Udayana	2	2
9	Universitas Brawijaya	3	3
10	Universitas Pancasila Tegal	2	2
11	Universitas Gajah Mada	4	4
12	Universitas Diponegoro	4	4
13	Universitas Nasional	0	0
14	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	0	0
15	Universitas Surabaya	3	3
16	Universitas Sebelas Maret	2	2
17	Universitas Sriwijaya	3	3
18	Institut Teknologi Indonesia	0	0
19	Universitas Mataram	0	0
20	Universitas Cenderawasih	0	0
21	Universitas Indraprasta	0	0
22	Universitas Mulawarman	2	2
23	Universitas Muhammadiyah Magelang	0	0
24	Universitas Padjajaran	1	1
25	Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta	0	0
26	Universitas Katolik Soegijapranata	0	0
27	Universitas Tanjung Pura	0	0
28	Universitas Sam Ratulangi	1	1
29	Universitas Palangka Raya	0	0
30	Universitas Riau	0	0
31	Universitas Sumatera Utara	0	0
32	Universitas Indonesia	0	0
33	Institut Teknologi Sepuluh Nop.	0	0
34	Universitas Trisakti	1	1
35	Universitas Islam Indonesia	0	0
36	Institut Teknologi Bandung	2	2
37	Universitas Lambung Mangkurat	0	0
38	Universitas Negeri Yogyakarta	0	0
	TOTAL	44	44

Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Perguruan Tinggi Tahun 2015



Rekapitulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemerintah Daerah (2013-2015)



Implementasi dari kesepakatan bersama tersebut diatas dilakukan dalam bentuk sosialisasi/workshop/seminar kerjasama standardisasi dengan topik terkait standardisasi seperti peran standardisasi bagi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penerapan SNI bagi UKM produk unggulan daerah, regulasi berbasis SNI, sertifikasi produk untuk UMKM, penerapan SNI pada produk olahan Makanan dan minuman, dan sistem manajemen energi.

Badan Standardisasi Nasional sampai dengan tahun 2015 telah memiliki 38 MoU dengan perguruan Tinggi dimana pada tahun 2015 terdapat 6 Univeristas yang turut aktif dalam memberikan insentif bimbingan penerapan SNI untuk UMK di daerah, yaitu diantaranya Universitas Sriwijaya, IPB, Universitas Jemderal Sudirman, Universitas Dipenogoro, Universitas Surabaya, Universitas Mulawarman.

Kegiatan *Nasional Mirror Committee* (NMC) merupakan kegiatan yang mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar internasional dimana kegiatan ini membuka kesempatan luas bagi stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perumusan standar internasional (*to make them involve*); menciptakan media pembelajaran bagi stakeholder dalam rangka capacity building terkait kegiatan perumusan standar internasional (*to make them learn*); dan membangun kepercayaan diri stakeholder dalam persaingan bisnis global (*to make them confidence*). Anggota NMC bertugas mengikuti perkembangan kegiatan teknis *technical committee*; memberikan tanggapan draft standar Internasional baik standar baru maupun revisinya; menghadiri sidang *technical committee* bila diperlukan; melakukan sosialisasi hasil sidang *technical committee*. Pada tahun 2015, terdapat 27 *technical committee* yang dipilih dan dikelola oleh Sekretariat *Mirror Committee* BSN. Selama tahun 2015 telah diterbitkan 6 buah SK Kepala BSN untuk keanggotaan NMC (ISO/TC 165 (*Timber Structure*), ISO/TC 242 (*Energy Management*), ISO/TC 292 (*Security and*

Resilience), IEC/TC 61 (*Safety House Hold and Similar Appliance*), ISO/TC 45 (*Rubber and rubber products*), ISO/PC 248 – *Sustainability criteria for bioenergy*).

Kegiatan kerjasama standardisasi di dalam negeri ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan standar, mendorong partisipasi pelaku usaha di daerah untuk ikut dalam kegiatan pengembangan standar, meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung daya saing produk nasional melalui pengembangan standar. Faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain kesiapan infrastruktur mutu di daerah, produk unggulan daerah, kondisi geografis yang sifatnya spesifik, dukungan sarana teknologi informasi, dll.

PKS melaksanakan pengelolaan penerbitan nomor identifikasi sesuai dengan ISO\IEC 7812, Issuer Identification Number (IIN). IIN merupakan nomor identifikasi untuk mendukung *interchange* antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi data elektronik, dalam lingkungan *interchange* internasional dan/atau antar-*industry interchange*. Selama tahun 2015, sekretariat IIN telah menerima 5 (lima) permohonan IIN dari : Koperasi Kredit CU Lantang Tipo-Kalbar; PT. BPR Sri Artha Lestari-Denpasar; PT. Bank Dinar Indonesia-Jakarta; PT. Artajasa Pembayaran Elektronik-Tangsel; dan PT. Nusa Satu Inti Artha-Jakarta. Pencapaian target yang masih belum optimal disebabkan karena permohonan penerbitan IIN dilakukan ketika ada kebutuhan suatu lembaga keuangan seperti perbankan untuk menerbitkan kartu ATM sehingga pendaftaran hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan lembaga tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada lembaga keuangan masih belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran.

Tabel 8. Rekapitulasi Aplikasi IIN (2013 – 2015)

Nomor	Tahun	Target Aplikasi	Realisasi
1	2013	10	7
2	2014	10	5
3	2015	10	5



C. KERJASAMA STANDARDISASI INTERNASIONAL

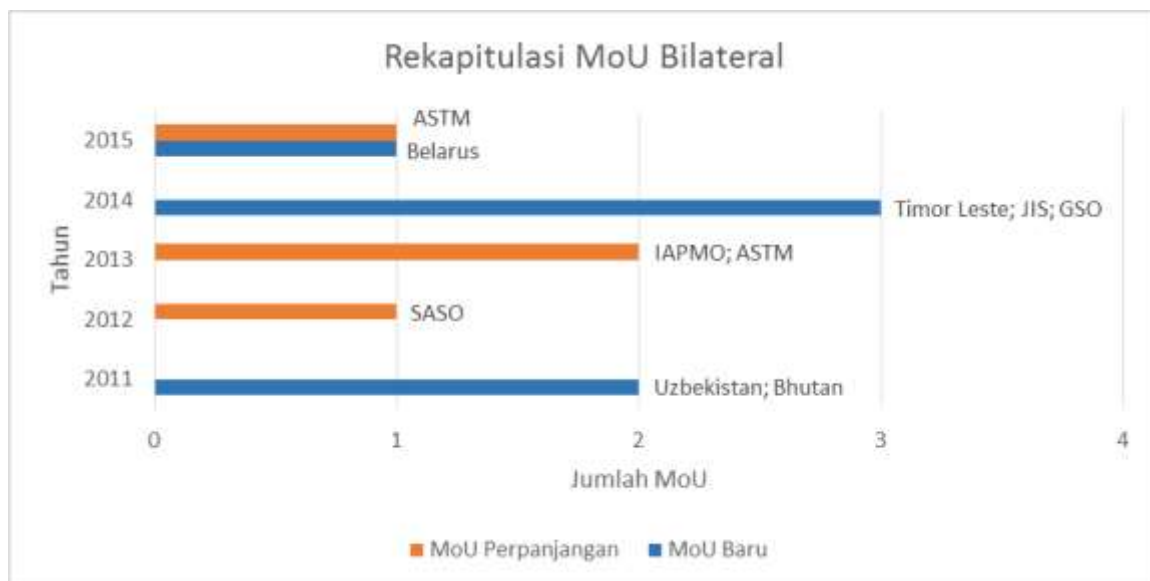
Kerjasama standardisasi internasional difokuskan pada kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

C.1. Forum Bilateral

Kerjasama di tingkat bilateral diarahkan guna mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar di kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan merekomendasikan pengembangan standar melalui adopsi standar ke dalam standar nasional. Kerjasama dilakukan dengan institusi di negara mitra yang bertanggung jawab dalam pengembangan standaridisasi termasuk badan standardisasi nasional (NSB) maupun dengan organisasi pengembang standar (SDO). Selain itu, kerjasama di tingkat bilateral juga diarahkan untuk memfasilitasi perdagangan termasuk bidang standar dan keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk oleh lembaga sertifikasi produk antar kedua negara.

Tabel 9. Rekapitulasi MoU Bilateral (2011-2015)

No.	Tahun	MoU Baru	MoU Perpanjangan	TOTAL
1	2011	2		2
2	2012		1	1
3	2013		2	2
4	2014	3		3
5	2015	1	1	2
TOTAL		6	4	10



Pada tahun 2015, BSN - KAN menandatangani 1 MoU dengan Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA) Belarus. Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2015, BSN telah menandatangani 12 MoU dengan NSBs/SDOs/kementerian terkait di negara mitra (GSO-Regional Timur Tengah; JISC-Jepang; MCIA-Timor Leste; ASTM International-Amerika Serikat; IAPMO; SASO-Arab Saudi; UZSTANDARD-Uzbekistan; BSB-Bhutan; KATS-Korea; BSI-Inggris; ISIRI-Iran; dan TSE-Turki). Selain itu, BSN juga sedang melakukan perintisan kerjasama dengan SOSMT-Slovakia; GOST R-Rusia; MEDT-Ukraina; dan BIS-India.

Dalam tahun 2015, kegiatan implementasi MoU mencakup kerjasama dengan IAPMO dengan menyelenggarakan Seminar *World Plumbing Day* dengan tema: “*A public outreach event to promote the role of plumbing in improving public health and safeguarding the environment, by uniting the World Plumbing Industry, for the benefit of all*”. Dalam seminar tersebut, BSN juga secara resmi melaunching SNI 8153:2015 tentang Sistem Plambing pada Bangunan. SNI ini mengacu pada *Unit Plumbing Code (UPC) 2012 International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)* dan *UPC Study Guide 2012*. Selain itu, BSN turut berpartisipasi dalam acara *The 86th Annual IAPMO Conference* di Amerika Serikat dimana Indonesia mempresentasikan progress overview dari proyek kerjasama antara IAPMO dan BSN yaitu kelanjutan dari SNI 8153:2015 Sistem Plambing pada Bangunan Gedung. Kegiatan implementasi MoU lainnya adalah partisipasi dalam *the First GCC Forum for Education Standardization di Qatar dan Seminar Peranan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Pembangunan Ekonomi di Timor Leste*.

C.2. Forum Regional,

kerjasama difokuskan kepada forum kerjasama ASEAN dan APEC.

C.2.1. Forum Regional ASEAN.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertindak sebagai *National Focal point* dan koordinator dalam forum ACCSQ (***ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality***). BSN bertugas memonitor perkembangan seluruh *Working Group (WG)* dibawah ACCSQ dan melakukan koordinasi dengan institusi terkait di tingkat nasional serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan komunikasi untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Score Card*. BSN mewakili Indonesia menjadi Ketua ACCSQ 2015. Dalam hal ini, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) BSN bertindak sebagai Sekretaris untuk ACCSQ *PWG on Automotives (A-PWG)* sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang, dan ACCSQ *PWG on Prepared Foodstuff (PF-PWG)* sejak April 2003 sampai dengan sekarang. PKS juga bertindak sebagai *Co-Chair Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE)* periode 2015-2016 dan *Contact Point Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE)*. Selain itu, PKS juga berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ACCSQ Plenary; PFPWG; APWG; JSC EEE; RBPWG; dan MDPWG.

Menuju implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, PKS-BSN aktif dalam memberikan tanggapan/posisi Indonesia atas isu-isu standar dan penilaian kesesuaian ASEAN. Pelaksanaan MEA dengan tujuan terciptanya kawasan pasar tunggal dan basis produksi dilakukan melalui integrasi 12 sektor prioritas (PIS). Namun hanya terdapat 6 sektor dari PIS yang terkait dengan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian yaitu *electronic, healthcare, otomotif, rubber based products, wood based products, dan agro based products*. Upaya integrasi 6 sektor tersebut dilakukan dalam bentuk harmonisasi standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknis antar negara anggota ASEAN. Ketiga proses harmonisasi tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk antara negara ASEAN sehingga terwujud arus pergerakan barang intra ASEAN yang lebih mudah, bebas dengan tetap memenuhi aspek mutu serta keamanan bagi konsumen.

Pada akhir 2015, forum ACCSQ telah berhasil merumuskan ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025 (S&CSP2025). Selanjutnya telah disetujui pula Rancangan Rencana Aksi (*Action Plan Template*) berisi 6 Sasaran strategis, program kegiatan dan sub program kegiatan di masing-masing WG dan PWG untuk periode 2016-2025 yang diukur dengan indikator output dan outcome. Semua program kegiatan WG dan PWG tersebut harus sinergi dengan sasaran dan komitmen pemimpin ASEAN dalam AEC Blue Print 2016-2025.

Pada tingkat nasional, dalam rangka memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA di bidang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka PKS-BSN telah mengadakan 6 (enam) kali Sosialisasi di daerah dan 1 (satu) kali *Forum Group Discussion* (FGD) di Jakarta.

C.2.2. Forum APEC SCSC.

Sebagai anggota ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), BSN berperan aktif khusus bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan bertindak sebagai *focal point* nasional di forum *APEC on Sub Committee on Standard and Conformance* (APEC SCSC) Hal ini merupakan bagian komitmen Indonesia dalam mencapai dan mewujudkan *APEC Bogor Goals*. Dalam Pertemuan APEC yang dilaksanakan tahun 2015, BSN telah mempresentasikan usulan proyek "*Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Enhancement Project on Information Security Management System (ISMS) Certification (ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27006:2011)*", "*Advancing knowledge about Term of Reference of APEC JRAC*", mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terkait erat dengan sistem perdagangan produk elektronika di Indonesia dan meminta undang-undang tersebut dimasukkan ke *legislative applicable database* dalam website APEC, serta berkesempatan pula untuk memaparkan kemajuan pendidikan standardisasi di Indonesia.

C.2.3. Forum ASEAN – FTA.

BSN berpartisipasi aktif dalam forum negosiasi ASEAN dengan negara mitra baik ASEAN + 1 Negara Mitra maupun ASEAN + 6 (RCEP). Dalam forum ini, partisipasi BSN adalah dalam negosiasi di bidang *Standard, Technical Regulations, dan Conformity Assessment* (STRACAP). Selama tahun 2015, telah dihasilkan dua kertas posisi dalam rangka partisipasi BSN dalam forum ASEAN + 1 (ASEAN-China FTA Joint Commission ke-4, ASEAN-Hongkong FTA ke-3). Selanjutnya juga telah dihasilkan empat kertas posisi dalam rangka memperkuat Delegasi Indonesia dalam mengikuti negosiasi dalam forum ASEAN – RCEP (ke-3, 4, 5, dan 6).

Selain dalam forum ASEAN dan APEC, BSN juga berpartisipasi aktif dalam forum *Pacific Asia Standard Congress* (PASC), forum yang memfasilitasi perkembangan standardisasi tingkat regional dan internasional yang beranggotakan 24 negara di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dapat memanfaatkan forum PASC untuk menggali dukungan dalam pemilihan posisi atau jabatan strategis di forum ISO, IEC dan ITU-T sehingga kepentingan Indonesia di bidang standardisasi dapat diperjuangkan secara lebih maksimal. BSN berpartisipasi dalam Forum PASC ke-38 dan mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan PASC ke-39 tahun 2016 mendatang.

C.3. Forum Kerjasama Multilateral

kegiatan difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta.

Di bidang kelistrikan, pada tahun 2015 Indonesia menyelenggarakan seminar dalam rangka kunjungan Presiden IEC. Hal ini dimanfaatkan sebagai *moment* pertemuan dan ajang diskusi dengan stakeholder bidang ketenagalistrikan yang dihadiri 25 peserta. Dalam pertemuan ini telah diidentifikasi permasalahan yang dihadapi stakeholders Indonesia dalam menerapkan standar IEC serta *update* informasi tentang perkembangan kemajuan teknologi kelistrikan yang nantinya akan menjadi acuan dalam perumusan standar IEC.

Salah satu syarat anggota International Electrotechnical Committee (IEC) adalah membentuk Komite Nasional. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan standardisasi membentuk Komite Nasional untuk IEC (KOMNAS IEC) Indonesia yang beranggotakan wakil-wakil dari para pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2015 KOMNAS IEC telah melaksanakan dua

kali pertemuan tahunan yang membahas kebijakan nasional di bidang kelistrikan dan partisipasi aktif stakeholders Indonesia dalam kegiatan standardisasi IEC.

Dalam forum pengembangan standar ISO dan IEC, BSN berperan aktif dalam memberikan tanggapan terhadap draft internasional standar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberterimaan SNI. Selama tahun 2015, BSN telah memberikan tanggapan sebanyak 747 draft ISO (100%) dan 406 buah (100%) untuk draft IEC.

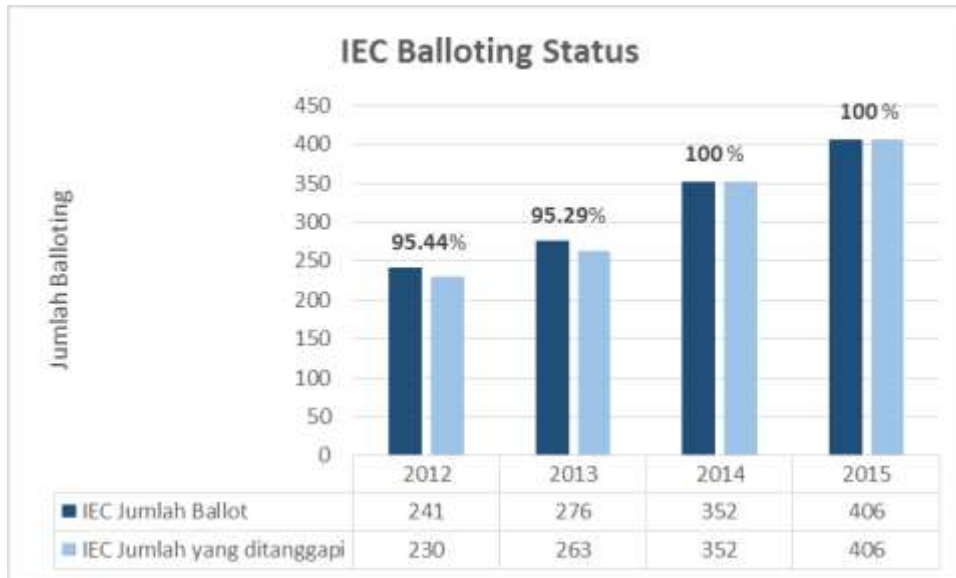
Tabel 10. Kinerja Tanggapan atas Draft Standar ISO (2012-2015)

ISO			
Tahun	Jumlah Ballot	Jumlah yang ditanggapi	Persentase
2012	517	513	99.23%
2013	393	392	99.75%
2014	743	741	99.73%
2015	747	747	100%



Tabel 11. Kinerja Tanggapan atas Draft Standar IEC (2012-2015)

IEC			
Tahun	Jumlah Ballot	Jumlah yang ditanggapi	Persentase
2012	241	230	95.44%
2013	276	263	95.29%
2014	352	352	100.00%
2015	406	406	100%



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam organisasi pengembangan standar ISO dan IEC. Di kedua organisasi tersebut, status keanggotaan dibagi dua kelompok berdasarkan keaktifan serta tanggung jawabnya yaitu sebagai *Participating Member (P-Member)* dan *Observer Member (O-Member)*. Dalam Komite Teknis ISO Indonesia menjadi P-member di 27 TC/ 54 SC, dan O-Member di 113 TC/ 39 SC. Selain itu, Indonesia juga menjadi *Co-Chair twinning program ISO/TC 207/SC 1 (Environmental Management Systems)* dan *Co-Secretary twinning program* untuk ISO/TC 207/SC 7/WG 5. Dalam ISO/TC 207 *Environmental Management Working Group (WG) 9*, Indonesia mengusulkan *project Land Degradation and Desertification (ISO 14055)*. Kemudian pada ISO/TC 207/SC 7/WG 7 *Framework Standard*, Indonesia menjadi *Convenor, Project Leader* dan *Secretary* yang mengusulkan serta mengembangkan standar *Guidance with framework and principles for methodologies on climate actions (ISO 14080)*. Pada tahun ini juga, Indonesia mengusulkan *draft SNI* terkait *Landslide Early Warning System (LEWS)* untuk dikembangkan menjadi standar internasional ISO di bawah Komite ISO/TC 292 *Security and Resilience*.

Tabel 12. Status Keanggotaan Indonesia di ISO (2012 – 2015)

Tahun	P-Member		O-Member	
	TC	SC	TC	SC
2012	26	53	108	38
2013	26	52	108	37
2014	25	50	110	39
2015	27	54	113	39

Keterangan:

TC = Technical Committee

SC = Sub Committee



Dalam Komite Teknis IEC, Indonesia menjadi P-Member di 8 TC/ 12 SC, dan O-Member di 24 TC/ 20 SC. Terdapat perubahan struktur organisasi komite teknis di IEC dimana Indonesia berpartisipasi. Beberapa komite teknis ada yang dilebur menjadi satu dan ada pula yang dibubarkan.

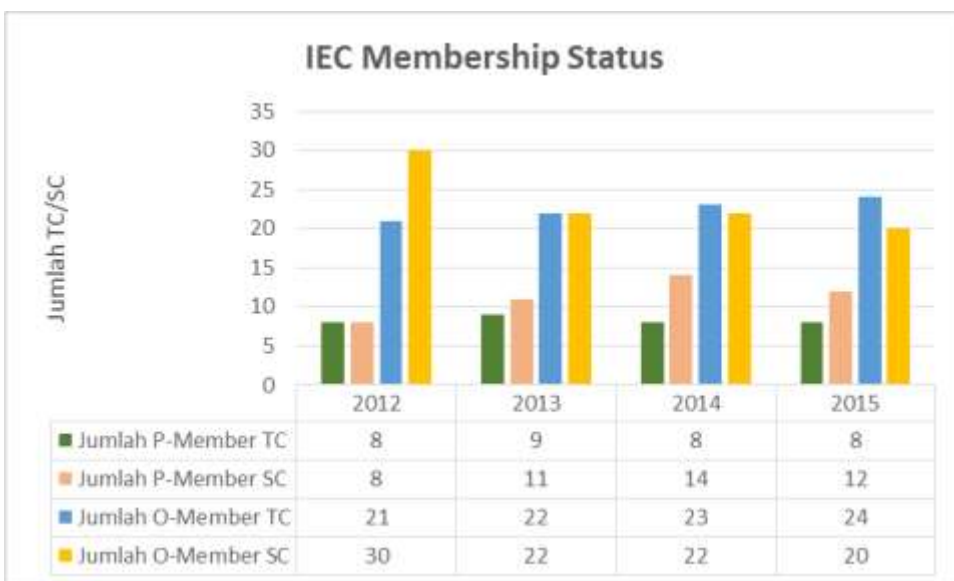
Tabel 13. Status Keanggotaan Indonesia di IEC (2012 – 2015)

Tahun	P-Member		O-Member	
	TC	SC	TC	SC
2012	8	8	21	30
2013	9	11	22	22
2014	8	14	23	22
2015	8	12	24	20

Keterangan:

TC = Technical Committee

SC = Sub Committee



Salah satu kendala yang dihadapi *National Standard Body* (NSB) pada umumnya adalah partisipasi aktif pemangku kepentingan khususnya tingkat kebijakan (*key stakeholder engagement*). Untuk itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan standarisasi internasional ISO perlu diperkuat. BSN bekerja sama dengan ISO menyelenggarakan “*ISO Days*” selama 3 hari (3-5 Juni 2015) di Jakarta. Kegiatan ini terdiri dari workshop, kunjungan teknis ke industri penerap SNI, PT. Wika Beton Karawang dan pelatihan. Hadir sebagai fasilitator kegiatan ini Mr. Rob Steele (Sekjen ISO) dan beberapa officer ISO lainnya. *ISO Days* melibatkan sekitar 100 peserta yang merupakan pemangku kepentingan nasional mewakili industri, pemerintah, maupun universitas. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. Andrinof Chaniago yang menyampaikan *keynote speech* masing-masing dengan tema pentingnya pendidikan standarisasi untuk menciptakan komunitas profesional standarisasi dan standarisasi dalam sektor prioritas nasional untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan pengembangan berkelanjutan. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan nasional dalam standarisasi internasional diperlukan untuk memperjuangkan sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam substansi standar internasional yang sedang dirumuskan.

Indonesia berpartisipasi aktif dalam 38th of *ISO General Assembly and its Related Meeting* dan 79th of *IEC General Meeting* dimana diperoleh informasi yang dapat dijadikan masukan untuk memperkuat sistem standarisasi nasional seperti strategi untuk memperoleh keberterimaan luas untuk produk ekspor Indonesia; strategi untuk mengatasi isu pengembangan berkelanjutan menggunakan standar; strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif Indonesia di forum ISO/IEC; strategi untuk mempromosikan manfaat standarisasi kepada pemangku kepentingan mulai dari UMKM hingga usaha besar, dari individu sampai ke pemerintah; dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan standar ISO/IEC. Pada sidang ISO/GA ini, Indonesia memperoleh kehormatan untuk menjadi salah satu pembicara pada *Panel discussion on Standards and Education*. Pada kesempatan ini Indonesia menyampaikan pengalaman dan *progress* pengembangan *Education on Standardization* yang telah dilakukan, sebagai bahan pembelajaran bagi negara-negara anggota ISO lainnya. Selanjutnya pada sidang IEC/GM ini, Indonesia memperoleh kehormatan untuk menjadi salah satu pembicara pada *Workshop Regional and National Adoption of IEC International Standards*. Pada kesempatan ini Indonesia selaku Ketua ACCSQ menyampaikan proses harmonisasi standar IEC untuk dijadikan acuan dalam harmonisasi standar di tingkat regional ASEAN menyambut akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

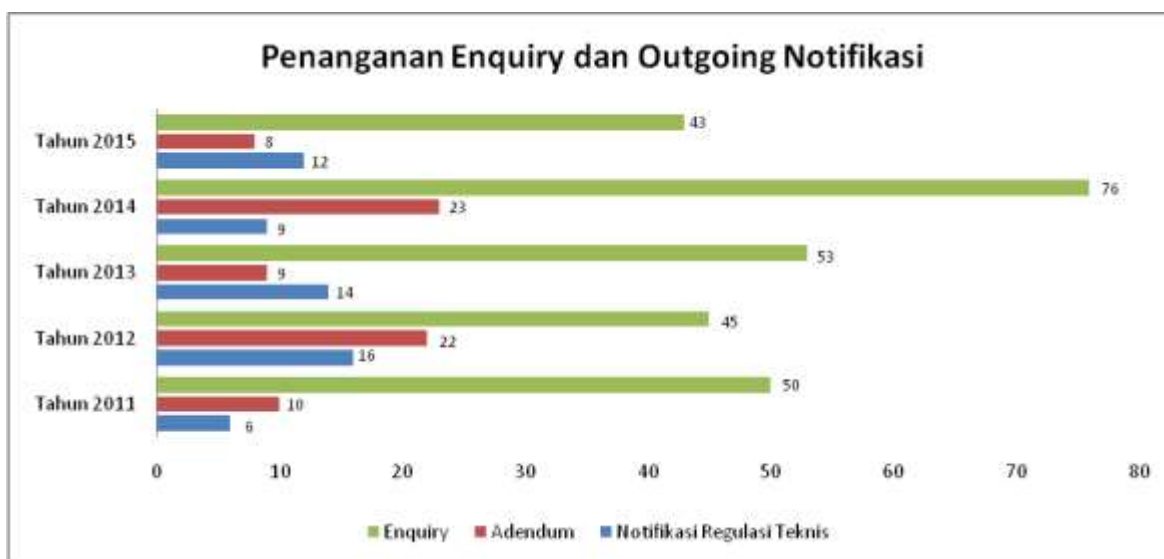
Dalam mendukung pengembangan SNI, BSN merintis kerjasama dengan beberapa organisasi standar dari negara lain yang standarnya banyak digunakan oleh industri dalam negeri, seperti: *ASME (American Society of Mechanical Engineers)*, *API (American Petroleum Institute)*, *NACE (National Association of Corrosion Engineers)*, *TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)*.

C.4. Forum WTO – TBT.

Dalam mendukung fungsi BSN sebagai Notificaton Body (NB) dan Enquiry Point (EP kegiatan PKS meliputi penanganan notifikasi *outgoing*, penanganan *incoming* notifikasi, *enquiries*, serta mendukung kerjasama FTA lainnya dalam bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian serta isu hambatan teknis lainnya. Selama periode 2010-2015, kinerja PKS sebagai NB dan EP dapat ditunjukkan dalam tabel dan grafik berikut:

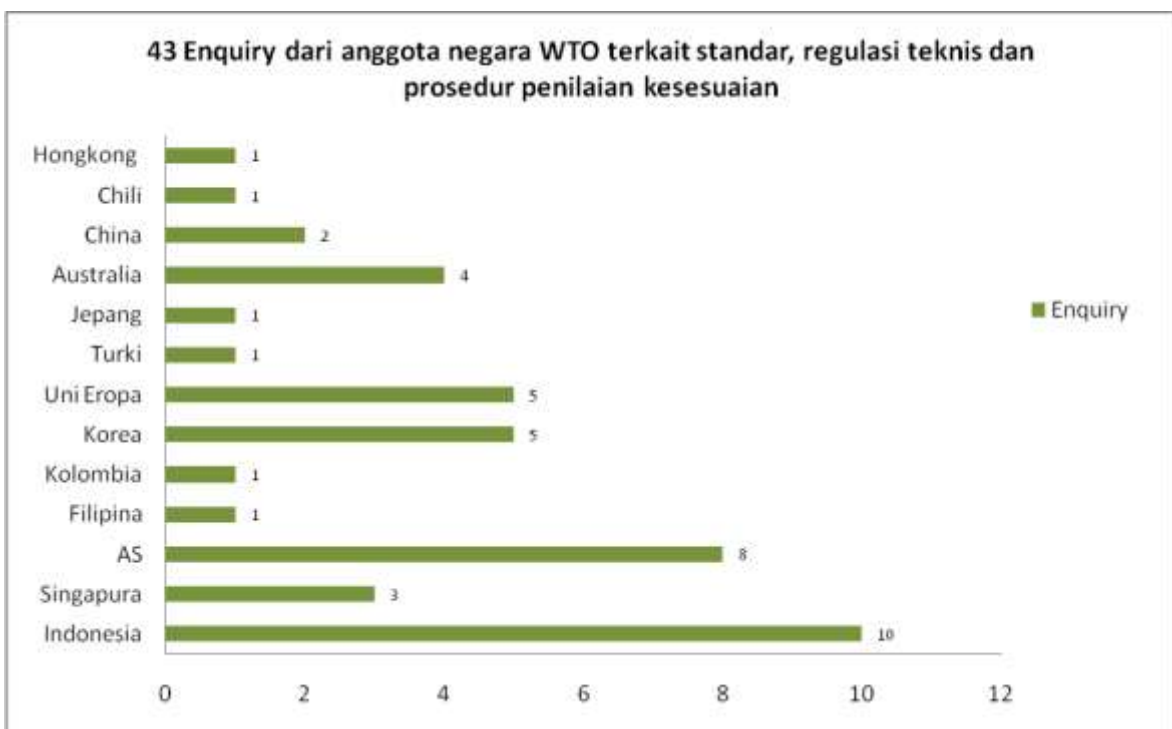
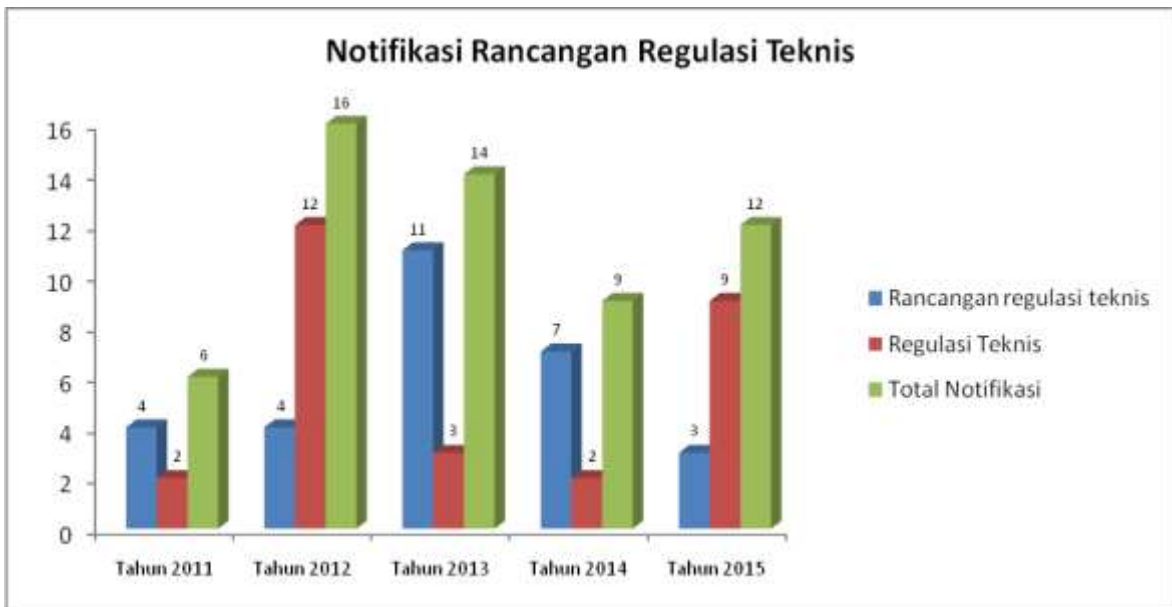
Tabel 14. Penanganan outgoing notifikasi dan Enquiry pada subbidang notifikasi Pusat Kerjasama Standardisasi BSN

	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Enquiry	50	45	53	76	43
Adendum	10	22	9	23	8
Notifikasi Regulasi Teknis	6	16	14	9	12



Tabel 15. Notifikasi Rancangan Regulasi teknis dan Regulasi Teknis

Tahun	Rancangan regulasi teknis	Regulasi Teknis	Total Notifikasi
2011	4	2	6
2012	4	12	16
2013	11	3	14
2014	7	2	9
2015	3	9	12



Selama tahun 2015 terdapat kurang lebih 1000 notifikasi yang diterima oleh BSN dan beberapa diantaranya dianggap berpotensi menghambat akses pasar Indonesia ke negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. BSN melakukan rapat koordinasi dengan beberapa K/L terkait untuk pembahasan hambatan perdagangan terkait antara lain: *Food for Medical Purpose* dari EU, *Lacey Act* (untuk produk kayu) dari AS, *plain packaging* dari Perancis, Peraturan Rokok dari Kanada, *Tobacco* dari Kenya, dll.

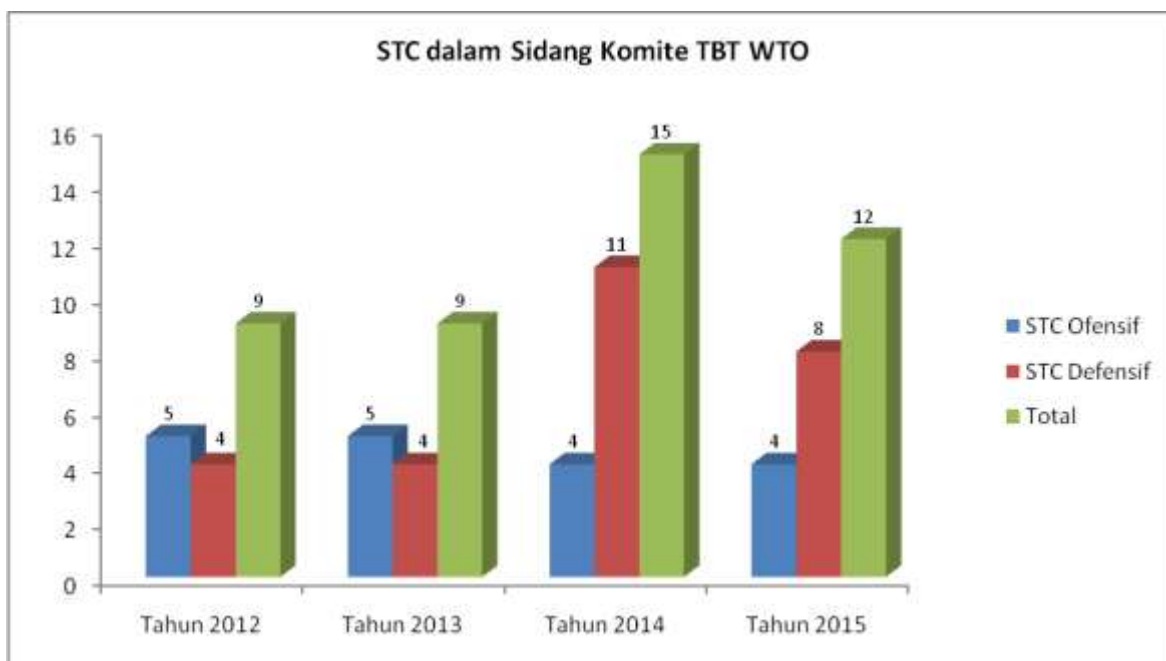
BSN juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan tanggapan terhadap *Secretariat Report* khususnya terkait *chapter Technical Regulation and Standards* terhadap TPR Thailand, dan Australia.

Selama pertemuan tahunan reguler TBT-WTO melalui agenda *Specific Trade Concern (STC)* yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, Indonesia menyampaikan posisi ofensif (aktif merespons notifikasi dan kebijakan anggota WTO lain) dan posisi defensif (aktif mempertahankan

kebijakan perdagangan Indonesia yang dipertanyakan oleh anggota WTO lain). Selama tahun 2015, terdapat 12 STC (4 STC ofensif dan 8 STC defensif).

Tabel 16. Perkembangan Posisi Indonesia untuk STC – WTO (2012-2015)

Tahun	STC Ofensif	STC Defensif	Total
2012	5	4	9
2013	5	4	8
2014	4	11	10
2015	4	8	12



D. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja PKS, diperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.10.564.249.000. Secara umum gambaran realisasi serapan anggaran DIPA tahun 2015 untuk Kedeputian PKS adalah sesuai dengan Tabel 11.

Tabel 17. Pagu anggaran dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2015 Kedeputian PKS - BSN

Program	Pagu awal sebelum pemotongan (Rp)	Pagu setelah pemotongan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Kerjasama Standardisasi	10.564.249.000	10.424.099.000	10.231.521.141	96.85
Total	10.564.249.000	10.424.099.000	10.231.521.141	96.85

Dari pagu yang diberikan tersebut, PKS mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar **96.85** %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PKS adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 18. Pagu anggaran PKS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2015

Output	Dana dalam Pagu	Realisasi SPJ	Sisa Dana	Persentase
001	Rp 474.362.000	Rp 444.034.875	Rp 30.327.125	93.61
002	Rp 3.450.000.000	Rp 3.325.471.805	Rp 124.528.195	96.39
003	Rp 2.140.000.000	Rp 2.108.720.959	Rp 31.279.041	98.54
004	Rp 4.451.444.000	Rp 4.353.293.502	Rp 98.150.498	97.80
005	Rp 48.443.000	Rp 20.123.215	Rp 28.319.785	41.54
	Rp 10.564.249.000	Rp 10.231.521.141	Rp 332727859	96.85

Bab IV. Penutup

Secara umum, kinerja PKS pada tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan tahun 2015 dari Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PKS yang ditetapkan dalam Renstra PKS tahun 2015-2019.

Dari sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Kerjasama Standardisasi selama tahun 2015, empat kegiatan berkontribusi kepada pengembangan SNI adalah:

1. Kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan;
2. Tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi;
3. Penguatan posisi Indonesia di bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
4. Fasilitasi pemberian tanggapan Indonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional

Prosentase tingkat capaian keempat kegiatan tersebut pada tahun 2015 disajikan pada table berikut.

Tabel 19. Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015 (kegiatan utama pendukung pengembangan SNI)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	1	Jumlah MoU yang ditandatangani	10 dokumen	21 dokumen	100 %
	2	Jumlah implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang telah dilaksanakan	16 workshop/ seminar	14 workshop/ seminar	88%
	3	Jumlah Posisi Indonesia di bidang SPK yang telah dirumuskan	15 kertas posisi	21 kertas posisi	140%
	4	Jumlah ballot yang telah ditanggapi	800 ballots	1153 ballots	144 %

Realisasi penanganan perumusan posisi Indonesia di bidang SPK mengalami peningkatan dari yang ditargetkan sebanyak 15 kertas posisi menjadi 21 kertas posisi sejalan dengan partisipasi Indonesia dalam forum pertemuan PASC, GSO, AHKFTA, ACFTA, ACCSQ-WG1, dan ACCSQ Special Meeting. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan balloting dimana dari target 800 dokumen yang harus ditanggapi, pada kenyataannya terdapat 1153 dokumen yang masuk dan semuanya telah diberikan tanggapan.

Kegiatan pada Pusat Kerjasama Standardisasi yang berkontribusi kepada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN adalah:

3. Penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO

4. Penguatan standar dan penilaian kesesuaian melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO

Pusat Kerjasama Standardisasi juga melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penanganan layanan aplikasi IIN.

Tabel 20. Target dan capaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2015 (kegiatan pendukung pencapaian IKU BSN dan pelayanan kepada masyarakat)

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
Memastikan fungsi notifikasi dan inquiry dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	1	Jumlah notifikasi dan inquiry yang diproses	20 dokumen notifikasi regulasi teknis dan 43 enquiry	20 dokumen notifikasi regulasi teknis dan 43 enquiry	100%
	2	Jumlah Kertas Posisi yang dirumuskan forum TBT WTO	12 kertas posisi	12 kertas posisi	100%
Memastikan pelayanan masyarakat terkait IIN	3	layanan aplikasi IIN	10 aplikasi	5 aplikasi	50%

Realisasi penanganan notifikasi dan enquiry, selama tahun 2015, dari target awal 60 enquiries, ternyata hanya ada 43 enquiries yang masuk dan semuanya ditanggapi sehingga capaiannya adalah 100%.

Perlu dicermati, bahwa perumusan target bisa dibedakan menjadi dua target yaitu 1) target yang sesuai dengan kebijakan BSN dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan BSN untuk mencapai, dan 2) target yang ditetapkan berdasarkan prediksi/perkiraan dari capaian tahun sebelumnya dimana hal ini bisa berubah sejalan dengan perkembangan kerjasama yang ada. Hal ini terjadi pada kegiatan penanganan MoU, balloting, serta penanganan notifikasi dan enquiries.

Sementara itu terkait pagu anggaran PKS tahun 2015 dan realisasinya, maka PKS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. **10.564.249.000**, untuk membiayai 4 (empat) kegiatan utama yang ada dimana hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 96.85 %.